

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI *IJARAH* PADA KJKS BMT

BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA

Elma Aprilia Kwairumaratu¹, Sartini, S.E., M.S., Acc., Ph.D., Ak., CA²

Universitas Ahmad Dahlan,¹Dosen Universitas Ahmad Dahlan.²

Email: ¹⁾ elmakwairumaratu99@gmail.com

ABSTRAK

KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri is an Islamic financial institution that uses the concept of results and in accordance with Islamic law, making BMT Bina Ihsanul Fikri products a choice of Muslim communities in Indonesia especially Yogyakarta who avoid usury. One of the Bina Ihsanul Fikri BMT products that is much sought after by the public is Ijarah.

This research is a qualitative descriptive study that aims to analyze the application of ijarah accounting to KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Where the purpose of this study is to analyze whether the ijarah contract applied by BMT BIF is in accordance with the DSN MUI Fatwa, and to analyze whether the application of the ijarah contract on BMT Bina Ihsanul Fikri is in accordance with Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 107.

The results showed that the terms of the ijarah contract applied by BMT Bina Ihsanul Fikri were in accordance with DSN MUI. Whereas the recognition when the ijarah object was obtained, the depreciation of the ijarah object, lease recognition during the contract period, cost recognition, measurement of rental income receivables, presentation of ijarah income, and disclosure were in accordance with PSAK 107. So it can be concluded that the application of ijarah accounting at BMT Bina Ihsanul Fikri when recognition, measurement, presentation and disclosure are in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 107.

Keywords: Application of Ijarah Accounting, PSAK No.107, and Baitul Maal wa Tamwil

ABSTRAK

KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan konsep bagi hasil dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk BMT Bina Ihsanul Fikri menjadi pilihan masyarakat muslim di Indonesia khususnya Yogyakarta yang terhindar dari riba. Salah satu produk BMT Bina Ihsanul Fikri yang banyak diminati masyarakat adalah Ijarah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi ijarah pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah akad ijarah yang diterapkan oleh BMT BIF telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, dan untuk menganalisis apakah penerapan akad ijarah pada BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan akad ijarah yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan DSN MUI. Sedangkan pengakuan pada saat objek ijarah diperoleh, penyusutan objek ijarah, pengakuan sewa selama masa akad, pengakuan biaya, pengukuran piutang pendapatan sewa, penyajian pendapatan ijarah, serta pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK 107. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107.

Kata kunci: *Penerapan Akuntansi Ijarah, PSAK No.107, dan Baitul Maal wa Tamwil*

PENDAHULUAN

Semakin berkembang zaman maka semakin banyak pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi beragamnya kebutuhan manusia maka tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Namun telah diketahui bahwa kebutuhan manusia akan uang terkadang ada yang bersifat mendesak seperti untuk membayar pengobatan rumah sakit, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan lainnya, untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat dapat mengajukan pinjaman kepada sesama atau kepada lembaga keuangan seperti bank maupun kepada lembaga keuangan non bank baik syariah ataupun konvensional (Priliana & Hisamuddin, 2015).

Namun, dengan banyak bermunculan lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat terkadang dalam transaksinya mempraktikkan riba/bunga yang dipandang sebagai keuntungan. Padahal di dalam Islam jelas dinyatakan bahwasanya riba itu merupakan sesuatu yang dilarang (Solihah, 2014).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu lembaga keuangan non bank berlandaskan syariah yang banyak didirikan adalah Baitul mal Wa Tamwil (BMT), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat (Deliyani, 2008)

BMT merupakan sebuah Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat (Wardani & Tho'in, 2013). Lembaga ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dimana pada saat itu seluruh harta yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah (rampasan perang) dan fa'i (rampasan non peperangan) dikumpulkan di lembaga Baitul Maal. Keberadaan Baitul Maal sangat membantu perekonomian orang miskin karena kebutuhan finansial mereka dapat dipenuhi oleh Baitul Maal yang dikelola oleh Amil yang bertanggung jawab langsung kepada Rasulullah dan atau kepada Khalifah atau pemimpin Islam pada masa itu (Dahlan, 1999).

Di Indonesia, telah banyak berdiri BMT yang berguna membantu masyarakat kecil dan menengah. Salah satu yang ada dan tumbuh di Indonesia yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri, yang berdiri pada tahun 1996 di Gedongkuning Yogyakarta. BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar.

BMT menawarkan dua produk yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*landing*). Penghimpunan dana di BMT berbentuk simpanan/tabungan, giro dan deposito dan akad yang digunakan adalah akad wadiah dan mudarabah. Dalam penyaluran dana kepada nasabah. BMT menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan di BMT terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip kerja sama dan prinsip sewa (Mahfud, 2017).

BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk pembiayaan multijasa. Hal ini merupakan bentuk pelayanan LKS untuk memenuhi permintaan nasabah dalam hal kebutuhan jasa (Deliyani, 2008).

Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dan akad yang digunakan adalah ijarah

dan kafalah. Pembiayaan ini digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, kepariwisataan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank syariah memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau *fee* yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase (DSN MUI).

Menurut Sayyid Sahiq dalam Fikih Sunnah, al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa upah sejumlah tertentu (Nurhayati & Wasilah, 2015: 232).

Penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yaitu dimulai dengan anggota (mu'ajjir) mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan ke BMT (musta'jir). Setelah dicapai kesepakatan antara anggota dengan BMT, maka akad pembiayaan ditanda tangani. Pihak BMT dapat mencairkan langsung dananya kepada anggota atau mentransfer dananya ke rekening anggota untuk digunakan sesuai kebutuhannya seperti biaya pendidikan, atau biaya kesehatan seperti biaya persalinan dan rawat inap untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah atau rumah sakit. Selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada BMT dengan cara mengangsur tiap bulan atau dengan sistem tempo dengan biaya tambahan dari harga awal pinjaman sebagai upah/imbalan (ujrah) yang didapat oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta (Mahfud, 2017).

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa BMT di Indonesia belum banyak yang menerapkan prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini mengambil KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta sebagai objek karena termotivasi dengan banyaknya kantor cabang yang didirikan, dan untuk mengetahui kebenaran tentang anggapan masyarakat. Tujuan penelitian ini tentang penerapan akuntansi ijarah dibandingkan dengan standar akuntansi syariah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Data yang diperoleh dari observasi di BMT BIF terdapat 10 kantor cabang yang didirikan, yaitu: Cabang Rejowinangun, Nitikan, Bugisan, Sleman, Pleret, Parangteritis, Gunungkidul, Kulonprogo dan Cabang Pembantu Gamping, Cabang Pembantu Maguwoharjo (Profile KSPPS BMT BIF, 2017). Berdasar uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA KJKS BMT BINA IKHSANUL FIKRI YOGYAKARTA”.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. *Baitul Maal wa Tamwil*

BMT adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan *Baitul Mal wa Tanwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil (Ni'mah, 2011).

2. Ijarah

Menurut Sayyid Sahiq dalam Fikih Sunnah, al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa/upah sejumlah tertentu (Nurhayati & Wasilah, 2015: 232).

Menurut Sabiq (1971) dalam Mahfud (2017), ijarah dapat menjadi *fasakh* (batal) karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *ain*.
- b. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*.

3. Fatwa DSN MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah:

1) Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Shigat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah, yaitu manfaat barang sewa, manfaat jasa dan upah.

2) Ketentuan Objek Ijarah

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- c. Menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan.

4) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (materil).

- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 107.

4.1 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1) Biaya Perolehan Aset Ijarah

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan

2) Penyusutan

- a. Objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
- b. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

3) Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
- b. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan

4.2 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1) Penyajian.

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

2) PENGUNGKAPAN

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan.
 - (ii) Pembatasan pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah.

BMT BIF mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ijarah diungkapkan dalam akad (perjanjian). BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107 antara lain: isi kesepakatan ijarah, seperti biaya perolehan, penyusutan atau amortisasi, pendapatan dan beban.

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta berlokasi tepat di Jln. Rejowinangun No 2B Kotagede Yogyakarta; Daerah Istimewa Yogyakarta 55171.

2. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, sumber data primer ini diperoleh melalui Informan yaitu penelitian yang direncanakan adalah bagian dari akuntansinya atau dari pengamatan kegiatan, yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan yaitu pimpinan atau pihak manajemen yang bertugas sebagai bendahara di BMT BIF. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana penerapan akuntansi *ijarah* yang diterapkan di BMT BIF Yogyakarta.

Data sekunder, sumber data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan BMT BIF Yogyakarta yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik Dokumentasi. Data yang dapat diperoleh seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dapat diperoleh dari teknik analisis komparatif kualitatif yaitu membandingkan antara teori PSAK No. 107 dengan hasil penemuan di Lapangan yaitu penerapan Akuntansi *Ijarah* pada Laporan Keuangan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi ijarah di BMT BIF Yogyakarta dengan DSN MUI.

Ketentuan ijarah menurut DSN MUI Pelaku harus cakap hukum dan baligh. BMT BIF sudah sesuai dengan ketentuan ijarah, karena penyewa sudah baligh dan cakap hukum, sedangkan dari aspek objek akad ijarah di BMT BIF adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan ijarah menurut DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000. Rukun dan Syarat Ijarah: Shigat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak, pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Sedangkan ketentuan di BMT BIF yaitu: Ijab dan qabul, Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Untuk rukun dan syarat akad ijarah yang diterapkan di BMT BIF sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah.
- b. Ketentuan Objek Ijarah menurut DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sedangkan di BMT BIF yaitu: Manfaat barang atau jasa dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syari'ah, manfaat dikenali secara spesifik sedemikian

rupa untuk menghilangkan ketidaktauan yang akan mengakibatkan sengketa. Ketentuan objek ijarah di BMT BIF sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

- c. Kewajiban LKS menurut DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan Kewajiban BMT BIF sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yaitu: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. Untuk kewajiban LKS di BMT BIF sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

2. Penerapan Akuntansi Ijarah Pada BMT BIF dengan PSAK No. 107

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pengakuan Biaya

Ketentuan biaya di PSAK 107 yaitu biaya perolehan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh, sebesar biaya perolehan. Untuk biaya perolehan di BMT BIF dilakukan pada saat memperoleh objek sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan di BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107.

2) Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan aset ijarah di PSAK 107 disusutkan jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Penyusutan objek ijarah di BMT BIF dilakukan selama umur manfaatnya, sudah sesuai dengan PSAK 107.

3) Pendapatan

Ketentuan saat pendapatan sewa dalam PSAK 107 adalah pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan dana pada BMT BIF diakui pada saat diteruskannya manfaat aset kepada penyewa, untuk pengakuan pendapatan sewa untuk pemilik aset di BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107.

4) Pengukuran Piutang Pendapatan

Pengukuran piutang di dalam PSAK 107 adalah piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode

pelaporan. Pengukuran piutang pendapatan sewa di BMT BIF diukur sesuai dengan nilai yang sebenarnya diakhir periode pelaporan, untuk pengukuran piutang pendapatan di BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107.

5) Pengakuan Biaya Perbaikan

Ketentuan biaya perbaikan yang dijelaskan di PSAK 107 adalah sebagai berikut: Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, dan dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah pada biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah di BMT BIF sudah sesuai PSAK 107 karena pengakuan biaya perbaikan rutin di BMT BIF dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya transaksi. Jika pengakuan biaya perbaikan tidak rutin di BMT BIF atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya transaksi.

6) Perpindahan Kepemilikan

Perpindahan kepemilikan di PSAK 107 dijelaskan bahwa perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap. Untuk perpindahan kepemilikan di BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107 karena perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad dan penjualan bertahap.

b. Penyajian

Ketentuan penyajian pendapatan ijarah dalam PSAK 107 yaitu pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait,

misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Penyajian pendapatan ijarah dalam laporan keuangan (laba/rugi) disajikan setelah dikurangi beban yang terkait dan disajikan secara neto, penyajian pendapatan di BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107.

c. Pengungkapan

Ketentuan pengungkapan dalam PSAK 107, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan.
 - (ii) Pembatasan pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah.

BMT BIF mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ijarah diungkapkan dalam akad (perjanjian). BMT BIF sudah sesuai dengan PSAK 107 antara lain: isi kesepakatan ijarah, seperti biaya perolehan, penyusutan atau amortisasi, pendapatan dan beban.

Tabel 4.1

Analisis Kesesuaian Akad Ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dengan Fatwa DSN MUI

No	Akad Ijarah BMT BIF	Ketentuan Ijarah Akad Ijarah DSN MUI	Keterangan
1	Ijab dan qabul berupa Pernyataan dari kedua belah pihak, Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa.	Rukun dan Syarat Ijarah: <i>Shigat Ijarah</i> , yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak, Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.	Sesuai
2	Manfaat barang atau jasa dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa yang bersifat dibolehkan	Ketentuan Objek Ijarah menurut DSN MUI yaitu: Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat	Sesuai

	(tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.	dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,	
3	Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan, menanggung hanya pemeliharaan.	Kewajiban LKS menurut DSN MUI sebagai pemberi manfaat barang atau jasa. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan.	Sesuai

Tabel 4.2

Analisis Keseuaian Akad Ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dengan PSAK NO 107

No	Item	Akad Ijarah di BMT BIF Yogyakarta	PSAK No. 107	Keterangan
1	Pengakuan dan Pengukuran a. Pengakuan Biaya	Biaya perolehan diakui saat memperoleh objek ijarah sebesar biaya perolehan	Biaya objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.	Sesuai
	b. Penyusutan dan Amortisasi	Penyusutan aset yang dapat disusutkan di BMT BIF dilakukan selama umur ekonomisnya	Disusutkan jika aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)	Sesuai
	c. Pendapatan sewa	Diakui pada saat diserahkannya manfaat aset	Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Sesuai

		kepada penyewa		
	d. Pengakuan biaya perbaikan objek	Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah diakui pada saat terjadinya, sedangkan untuk perbaikan rutin tetap ditanggung oleh penyewa	Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan padapemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya	Sesuai
	e. Pengukuran pendapatan sewa	Piutang pendapatan sewa diukur sesuai dengan nilai yang direalisasikan diakhir periode pelaporan	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan	Sesuai
	f. Perpindahan Kepemilikan	Perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap	Perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap	Sesuai
2	Penyajian	Penyajian pendapatan ijarah dalam laporan keuangan (Laba/rugi) BMT BIF disajikan setelah dikurangi beban yang terkait dan disajikan secara netto	Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.	Sesuai
3	Pengungkapan	BMT BIF mengungkapkan	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan	Sesuai

		<p>hal hal yang terkait dengan transaksi ijarah, namun hal-hal tersebut diungkapkan dalam akad (Perjanjian) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan umum isi akad yang signifikan. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah. 	<p>terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Pembatasan pembatasan, misalnya ijarah-lanjut. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah. 	
--	--	--	---	--

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Ketentuan akad ijarah yang diterapkan oleh BMT BIF sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.
- Akuntansi Ijarah yang di praktikan oleh BMT BIF yaitu Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena peneliti hanya dapat mewawancarai 1 informan saja yaitu Ibu Heti Ambar Pratiwi sebagai bendahara. Peneliti juga tidak dapat menjangkau ke pimpinan/manajer BMT BIF sebagai Informan.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Karena BMT Bina Ihsanul Fikri sudah menerapkan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku yaitu PSAK No. 107 penulis menyarankan agar BMT Bina Ihsanul Fikri dapat secara konsisten melakukan penerapan tersebut.
2. Perlu diadakan evaluasi kembali oleh peneliti selanjutnya mengenai penerapan PSAK Syariah di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan meneliti produk-produk pembiayaan dengan mengambil akad lain misalnya murabahah, salam, istisnha, rahn, dan musyarakah ataupun produk-produk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Ali, Hasan. (2008). *Marketing*. Yogyakarta:Pressindo.

Dahlan, Abdul Aziz. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Edisi II). Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve

Deliyani, I. (2008). Analisa terhadap aplikasi pembiayaan *ijarah* Multijasa pada BMT Al-munawwarah. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/17792/1/INDAH%20DELIYANI-FSH.pdf> Diakses tanggal 11 Agustus 2019

Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2000. No. 44/DSN-MUI/IV/2000
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/> Diakses tanggal 17 September 2019

Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, Ali M. (2003). *Berbagi macam transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Mahfud, Wahib. (2017). Analisis Akad Sewa Menyewa di BMT Tumang Ditinjau dari Prespektif Ijarah dan ketentuan akuntansi syariah. *Skripsi*. Surakarta: Institut AgamaIslam. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/867/> Diakses tanggal 11 Agustus 2019

Nasional, Dewan Syari'ah. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI . Jakarta: Erlangga

Nurhayati, S. & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Ni'mah, Ulin. (2011). Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/10662/> Diakses tanggal 11 Agustus 2019

Priliana, K., & Hisamuddin, N. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Cabang Jember. *Jurnal Mahasiswa*, 4(1), 1-5

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107. 2009. Ijarah
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-107.pdf>
Diakses tanggal 22 April 2019

Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press

Sholihah, A. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1320> Diakses tanggal 11 Agustus 2019.

Syahdeni, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Wardani, H. & Tho'in, M. (2013) Pengelolaan *Baitul Maal* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal akuntansi dan pajak*. 14(1), 6-10